

**KETERKAITAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2014**

(Tesis)

Oleh

DWI LAILA WIDAYANTI



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNGG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**THE LINKS BETWEEN REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
WITH HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) ON DISTRICT/CITY
IN INDONESIA 2014**

By

DWI LAILA WIDAYANTI

ABSTRACT

This study attempts to find empirically whether there is a relationship or the links between financial performance of regional governments to public welfare. Financial performance of local governments seen through BPK opinion on the LKPD while public welfare represented of the HDI. Using the correlation analysis, testing done with samples from 502 district/city in indonesia for BPK opinion and HDI obtained by local government 2014.

The results of the correlation indicated weak relationships and in line between BPK opinion with HDI of district/city in indonesia 2014. Based on government type, for district type showed there are weak relations in line between BPK opinion with HDI, while for city type an opposite or there was no correlation . Based on island territory showed there are weak relations for Sumatra and NTT-NTB-Papua-Maluku while for Jawa-Bali, Kalimantan and Sulawesi it has proven do not correlate .

The discovery of the research of a relation between BPK opinion with HDI give us more obvious about the links between accountability financial performance of local governments to the level of prosperity of its community. Based on the results of correlation testing series empirically demonstrable that relationship between BPK audit result with the community welfare is still weak . Good performance of local governments financial does not necessarily followed the success of local government performance vice versa.

Keywords: BPK Audit Result, Human Development Index (HDI), Agency Theory, Spearman Correlation

KETERKAITAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2014

Oleh

DWI LAILA WIDAYANTI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti secara empiris apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat melalui opini BPK atas LKPD sedangkan kesejahteraan masyarakat direpresentasikan dari nilai IPM. Menggunakan analisis korelasi, pengujian dilakukan dengan sampel sebanyak 502 kabupaten/kota di Indonesia untuk opini BPK serta IPM yang diperoleh pemerintah daerah tahun 2014.

Hasil uji korelasi pada opini BPK dengan IPM untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 menunjukkan adanya hubungan yang lemah dan searah. Berdasarkan tipe pemerintahan menunjukkan terdapat hubungan searah antara opini BPK dengan IPM meskipun hubungannya lemah sekali sedangkan untuk tipe pemerintahan kota tidak terdapat hubungan. Berdasarkan pembagian wilayah pulau menunjukkan Sumatera dan NTT-NTB-Papua-Maluku terdapat korelasi lemah dan searah sedangkan untuk Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi justru terbukti tidak berkorelasi.

Penemuan dari hasil penelitian tentang keterkaitan antara opini BPK atas LKPD dengan IPM memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil dari serangkaian pengujian korelasi secara empiris dapat dibuktikan bahwa hubungan antara opini hasil audit BPK LKPD dengan kesejahteraan masyarakat masih lemah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik tidak serta merta diikuti dengan keberhasilan kinerja pemerintah daerah begitu pun sebaliknya.

Kata kunci : Opini BPK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Teori Agensi, Korelasi spearman

**KETERKAITAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAERAH
DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2014**

Oleh

DWI LAILA WIDAYANTI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **KETERKAITAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2014**

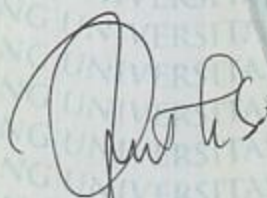
Nama Mahasiswa : **Dwi Laila Widayanti**


No. Pokok Mahasiswa : 1421031020

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

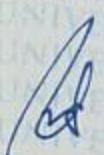
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung




Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001


Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **21 Desember 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **“Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia mananggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,

Januari 2017

Pembuat Pernyataan,



Dwi Laila Widayanti
NPM. 1421031020

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 16 Juni 1984 yang merupakan anak kedua pasangan Bapak Suwito Hadi dan Ibu Misrudatin, Alm.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Pekalongan, Pendidikan SD di SDN 01 Pekalongan Lampung Timur yang diselesaikan tahun 1996, kemudian SLTP Al Quran Metro yang diselesaikan tahun 1999, dan SMU I Metro yang diselesaikan tahun 2002. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata I di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi dan selesai tahun 2008.

Penulis mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2009 di Lingkungan Pemkab Tanggamus lalu pada Tahun 2012 penulis berpindah tugas ke lingkungan Pemkot Metro yang kemudian ditahun 2014 penulis kembali berpindah tugas di lingkungan Pemkot Bandar Lampung menjadi pelaksana di Sub Bagian Keuangan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2014 pula penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa STAR BPKP.

MOTTO

**Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan
sekitar. Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu
sesama manusia (B.J. Habibie)**

**“Sometimes what you want isn’t always what you get,
but in the end what you get is so much better than what you wanted”**

**Sejatinya, tidak ada usaha yang sia-sia karena setiap tetes keringat dan
air mata yang kita jatuhkan akan dibalas dengan harga yang setimpal
oleh Nya, Sang Maha Rahim
(Alfi Syahra)**

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Alm. Ibunda tercinta dan Bapak
2. Mama dan Papa
3. Suamiku tercinta yang selalu siaga dalam memberi dukungan
4. Mba Ririn dan Adit yang memberi inspirasi untuk tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu
5. Anak-anakku Kila dan Rayya yang selalu sabar nungguin mama
6. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I

SANWACANA

Penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini. Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam menyusun tesis ini, penulis sadari masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai rasa syukur dalam kesempatan ini penulis mengucapkan berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sartia Bangsawan, S.E, M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, M.B.A., Ph.D., Akt selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si. Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, saran, dan waktunya selama penyusunan tesis;
4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si Akt. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan pengarahan dan saran selama penyusunan tesis;
5. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama penyusunan tesis;

6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan tesis;
7. Bapak Dedy Yuliawan, S.E., M.Si selaku Pembahas II yang juga telah memberikan waktu dan bimbingan serta masukan selama penyusunan tesis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang selama kuliah telah memberikan Ilmu dan berbagi Pengalaman yang sangat berharga;
9. Pengelola dan karyawan serta karyawan yang telah ikut membantu dalam kelancaran perkuliahan;
10. Alm. Ibunda tercinta yang selalu kukenang nasihat dan perjuanganmu dan bapak yang sangat perhatian dan senantiasa mendoakan anak-anaknya.
11. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I, Mas Acep, Mas sidiq, Mas Sukani, Mas Windy, Mas Fadri, Uda Zayendra, Mba Dewi, Mba Endang, Mba Dani, Mba Juwe, Mba Reny, Maisaroh, Mba Eva, Mba Desi, Mba Sadu, Firda, Teh Lilis, Mba Ida, Mba Feria, Mba Heni, Nani, Mba Nurul, Mega dan Anifa, serta Pak Narso Alm, yang selalu kompak dalam segala hal, terimakasih untuk suka duka serta kebersamaannya.
12. Keluarga besar Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Penulis sadari dengan segala keterbatasan, masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dalam perbaikan penulisan yang akan datang. Akhirnya semoga karya ini bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis

Daftar Isi

	Halaman
Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTHESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Kinerja Keuangan	14
2.1.2 Opini Audit BPK atas LKPD	16
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat	22
2.1.4 Teori Agensi dalam Pemerintahan	27
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
2.3 Rerangka Penelitian	35
2.4 Hipotesis	37
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Data	39
3.2.1 Sumber Data	40
3.2.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Definisi Operasional Variabel	42
3.3.1 Opini Audit BPK atas LKPD	42
3.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	43
3.4 Metode analisis data	45

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran deskriptif variabel penelitian	49
4.1.1 Opini Audit BPK	49
4.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	53
4.2 Hasil Uji Korelasi	58
a. Korelasi antara Opini BPK dengan IPM untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia	59
b. Korelasi antara Opini BPK dengan IPM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasarkan Tipe Pemerintahan	61
c. Korelasi antara Opini BPK dengan IPM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasarkan Wilayah Pulau ...	64
4.3 Pembahasan	69
4.4 Keterbatasan Penelitian	75

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	79

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1. Perkembangan Opini Audit Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2010 sampai 2014	6
1.2. Tren Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2010 sampai 2014	7
1.3. Contoh Perkembangan Perolehan Opini dan Kesejahteraan Masyarakat pada Beberapa Daerah di Indonesia	9
2.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya	
3.1. Kriteria Capaian IPM	45
3.2. Kriteria Koefisien Korelasi	47
4.1. Statistika Deskriptif Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	50
4.2. Statistika Desdkriptif IPM Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	54
4.3. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	59
4.4. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM pada kabupaten/kota tahun 2014	60
4.5. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan IPM Berdasarkan Tipe Pemerintahan Tahun 2014	61
4.6. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM Berdasarkan Tipe Pemerintahan Kabupaten Tahun 2014	63
4.7. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM Berdasarkan Tipe Pemerintahan Kota Tahun 2014	63
4.8. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan IPM Berdasarkan Pembagian Wilayah Pulau Tahun 2014	64
4.9. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM di Wilayah Sumatera Tahun 2014	66

4.10. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM di Wilayah NTB-NTT-Maluku-Papua Tahun 2014	66
4.11. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2014	67
4.12. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM di Wilayah Kalimantan Tahun 2014	68
4.13. Hasil Korelasi antara Opini BPK atas LKPD dengan Komponen IPM di Wilayah Sulawesi Tahun 2014	68

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
2.1. Rerangka Penelitian	36
4.1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	51
4.2. Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Tipe Pemerintahan	52
4.3. Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Wilayah Pulau	53
4.4. IPM Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014	55
4.5. IPM Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Tipe Pemerintahan	56
4.6. IPM Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Wilayah Pulau	58

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mulai memasuki era desentralisasi sejak diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta undang-undang perubahannya. Sampai dengan saat ini, sistem desentralisasi di Indonesia yang lebih dikenal dengan otonomi daerah didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya penyempurnaan undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan dasar lebih baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia.

Dengan adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan berupa: 1) Pendapatan Asli daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain. Daerah otonom juga harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana, baik yang berasal dari PAD maupun yang diterima dari

pemerintah pusat (Dana Perimbangan) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (Indrarti, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan karena pemerintah daerah selaku pelaksana harus mampu memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2009). Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis dan sesuai dengan yang diamanatkan. Pemerintah daerah selaku pengelola keuangan harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya yang ada demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akbar dan Djazuli (2015) menyebutkan akuntabel dan transparan seperti layaknya pilar yang menopang tata kelola keuangan yang baik sehingga tercipta kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pasal ini secara eksplisit disebutkan ada dua faktor penentu bagi tercapainya kemakmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan yang baik, yaitu terbuka atau transparan dan bertanggung jawab atau akuntabel (Akbar dan Djazuli, 2015).

Ng'eni (2016) dalam penelitiannya mencoba untuk menilai bagaimana peran audit dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah melalui aspek teoritis di negara Tanzania. Menurutnya pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat di tingkat lokal sehingga audit akan sangat memberi kontribusi bagi keberhasilan akuntabilitas keuangan yang menjamin ketepatan dalam penggunaan dana publik. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik merupakan sarana ampuh untuk mencegah, menemukan penipuan dan korupsi .

Audit menjadi penting karena memberikan keterkaitan pada evaluasi berbagai kontrol, memeriksa penyimpangan dari standar yang berlaku dan setiap contoh atau tindakan penyimpangan, inefisiensi dan ketidakefektifan dengan motif mengambil aksi korektif . Terutama bagi negara dengan pemerintahan daerah yang jumlahnya cukup banyak, audit bisa menjadi alat yang digunakan untuk mengawasi apakah keuangan publik benar-benar telah digunakan sebagaimana mestinya (Aikin, 2011 dalam Badara dan Saidin , 2012).

Keuangan publik selalu menjadi wilayah tujuan populer karena sifatnya yang merupakan dimensi praktis yang menggambarkan hubungan antara negara dan masyarakat (Bartoszerwicz, 2015). Seperti dikemukakan Nyman, Nilsson dan Rapp (2005) bahwa audit merupakan sinyal bagi prinsipal dalam hal ini masyarakat dimana audit dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pokok informasi berharga tentang kinerja agen atau pemerintah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, audit menjadi sangat urgen karena audit

pemerintah daerah memiliki fokus sebagai alat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal atau masyarakat.

Ebimobowei dan Binaebi (2013) mencoba menguji efektivitas audit atas rekening pemerintah daerah di negara bagian Bayelsa, Nigeria. Temuan dalam penelitian Ebimobowei dan Binaebi menunjukkan bahwa audit memastikan pelaporan pengelolaan yang tepat atas penggunaan keuangan publik tanpa campur tangan politik. Audit sektor publik menyediakan mekanisme kunci di mana akuntabilitas keuangan diberlakukan dalam organisasi sektor publik. (Gideon dan Tawanda, 2012 dalam Ng'eni , 2016). Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan pentingnya audit atas laporan keuangan pemerintah karena sebagai salah satu cara agar tercapai akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pemerintah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada kemakmuran rakyat.

Tetapi penelitian Akbar dan Djazuli (2015) yang mencoba melihat hubungan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat justru membuktikan secara empiris ternyata belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, pemeriksaan atau pelaksanaan audit pada pemerintah di Indonesia masih sebatas pada audit atas pengelolaan keuangan belum dikaitkan dengan hasil atau kinerja organisasi pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat.

Semestinya audit dan pemberian opini terhadap entitas pengelola keuangan negara, seperti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah didasarkan pada

pencapaian dalam meningkatkan aspek-aspek kesejahteraan. Hasil opini pemeriksaan hanya pada penggunaan dana publik saja belum pada penilaian kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi yaitu pelayanan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam era otonomi daerah saat ini pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang krusial mengingat pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat daerah.

Opini hasil audit atas LKPD merupakan salah satu parameter penilaian akuntabilitas pemerintahan di daerah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan Undang-undang Pemeriksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara nomor 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan dan diserahkan, harus terlebih dahulu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setiap pemerintah daerah wajib menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan perhitungan APBD, Laporan aliran kas dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat atas penggunaan uang milik negara. Hasil audit dari BPK tersebut berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu LKPD (Heriningsih dan Marita, 2010). Hasil audit atas LKPD berupa opini dari auditor yang menjadi poin penting karena opini tersebut menjadi salah satu indikator pencapaian *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

Tabel 1.1. Perkembangan Opini Audit Pemerintah Daerah di Indonesia
Tahun 2010 sampai 2014

Tahun	Opini Audit BPK atas Pemeriksaan LKPD				Jumlah LKPD
	WTP	WDP	TMP	TW	
2010	31 (6%)	344 (66%)	120 (23%)	26 (5%)	521
2011	68 (13%)	351 (67%)	94 (18%)	10 (2%)	523
2012	120 (23%)	319 (61%)	78 (15%)	5 (1%)	522
2013	157 (30%)	309 (59%)	47 (9%)	10 (2%)	523
2014	252 (47%)	247 (46%)	35 (6%)	5 (1%)	539

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2015 (data diolah)

Berdasarkan hasil audit LKPD pemerintah daerah seluruh Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terlihat adanya perkembangan opini yang semakin baik dari tahun ke tahun. Perkembangan opini audit atas LKPD dari tahun ke tahun terlihat cukup signifikan. Kenaikan opini WTP dari tahun 2010 sampai tahun 2014 cukup baik dengan adanya peningkatan dari hanya 31 LKPD menjadi 252 LKPD dalam kurun waktu lima tahun. Hasil atas audit LKPD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangan daerah dengan benar. Hal ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin baik.

Pada tingkat kesejahteraan masyarakat, Indonesia masih memiliki banyak tantangan karena tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah masih sangat bervariasi bahkan masih cukup banyak daerah yang masuk dalam kategori rendah. Banyak daerah di Indonesia yang pembangunannya belum optimal. Hal ini terlihat dari perolehan nilai IPM Indonesia tahun 2014 yang masih jauh di bawah rata-rata dari sejumlah negara di ASEAN termasuk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina (BPS, 2015).

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada banyak indikator yang dapat digunakan yaitu secara ekonomi, sosial, budaya dan lainnya melalui berbagai instrumen diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pendapatan perkapita (*income per capita*), Indeks Pembangunan Manusia (*human development index*), tingkat kemiskinan dan Rasio indeks gini. Tiap-tiap indikator tersebut memiliki sifat pengukurannya masing-masing tergantung dari faktor mana yang dijadikan sebagai ukuran. Indikator kesejahteraan tersebut tidak bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lain karena setiap indikator memiliki esensi pengukuran yang berbeda-beda.

Tabel 1.2. Tren Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2010 sampai 2014

Tahun	Indikator Kesejahteraan Masyarakat			
	Nilai IPM	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Penduduk Miskin	Indeks Gini Ratio
2010	66,53	31,02	13,33	0,38
2011	67,09	30,12	12,49	0,41
2012	67,70	29,25	11,96	0,41
2013	68,31	28,17	11,36	0,41
2014	68,90	28,28	11,25	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (data diolah)

Berdasarkan data dari BPS, secara umum tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Indonesia secara total sebesar 66,53 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 67,09. Selanjutnya, selama periode tahun 2012 sampai 2014 IPM Indonesia berturut-turut yaitu 67,70 pada 68,31 dan pada 2014 sebesar 68,90. Nilai IPM tertinggi dimiliki DKI

Jakarta diikuti DI Jogjakarta dan nilai terendah dimiliki Propinsi Papua. Nilai IPM Indonesia masih cukup bervariasi dengan *range* sebesar 21,86 yang artinya kesejahteraan di Indonesia masih belum merata. Masih terdapat daerah dengan tingkat kesejahteraan yang minim terutama terlihat pada wilayah yang berada di kawasan Indonesia bagian Timur.

Bila melihat pada perkembangan indikator kesejahteraan di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2015, meskipun terjadi tren peningkatan namun masih belum signifikan. Hal tersebut akan lebih bervariasi bila dilihat berdasarkan skala yang lebih kecil seperti berdasarkan kabupaten/kota. Masih minimnya peningkatan pada indikator kesejahteraan di Indonesia memunculkan pertanyaan apakah selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dikelola sebagai keuangan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadi salah satu tugas bagi badan audit untuk mengawasi apakah pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan produktif untuk kesejahteraan rakyat.

Pada kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada korelasi yang jelas antara perolehan opini atas audit keuangan daerah yang semakin baik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan opini atas laporan keuangan ternyata tidak selalu dibarengi dengan perkembangan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti dicontohkan pada beberapa kondisi di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 1.3. Contoh Perkembangan Perolehan Opini dan Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa daerah di Indonesia

Daerah	Tahun	Perolehan Opini BPK	Indikator Kesejahteraan	
			IPM	Tingkat Kemiskinan
1. Provinsi Nusa Tenggara Timur	2012	WDP	60,81	20,41%
	2013	WDP	61,68	20,24%
	2014	WDP	62,26	19,60%
2. Provinsi Bengkulu	2012	WTP	66.61	17,50%
	2013	WTP	67.50	17,51%
	2014	WTP	68.06	17,75%
3. Provinsi Lampung	2012	WTP	64,87	15,65%
	2013	WDP	65,73	14,39%
	2014	WTP DPP	66,42	14,21%
4. Provinsi Jawa Timur	2012	WTP	66,74	13,08%
	2013	WTP DPP	67,55	12,73%
	2014	WDP	68,14	12,28%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2016 (data diolah)

Tabel 1.3 memperlihatkan sampai dengan saat ini keterkaitan antara perolehan opini BPK yang semakin baik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum jelas. Beberapa kondisi yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan perkembangan opini atas laporan keuangan tidak selalu sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang menjadi pertanyaan apakah pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah berjalan dengan tepat. Karena idealnya jika opini atas laporan keuangan semakin baik maka pelaksanaan program-program pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat juga seharusnya terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan tugasnya, BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di bidang apapun bisa dipastikan

mempergunakan dana yang bersumber dari pemerintah atau negara. Seluruh pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi, politik sosial dan budaya, memerlukan keuangan negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Penggunaan keuangan negara yang tidak taat atura, semauanya sendiri serta digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penggunaannya. Oleh karena itu melalui audit BPK, diharapkan dapat mendorong penggunaan keuangan negara oleh pemerintah secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara merupakan jaminan bagi masyarakat atas amanah yang diberikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009), Akuntabilitas pada organisasi sektor publik mempunyai arti bahwa terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) dalam pengelolaan pemerintahan daerah antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Dalam hal ini, Pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu sarana dalam meminimalkan konflik keagenan sekaligus mewujudkan penerapan *good public governance* (Zimmerman, 1977 dalam Adzani dan Martani, 2014). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai principal merupakan salah satu kunci utama terciptanya pengelolaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah sebagai agent yang didukung oleh keterbukaan informasi yang baik (Adzani dan Martani, 2014).

Keberhasilan atas pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah seharusnya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan pemerintah sehingga penggunaan APBD seharusnya berdampak pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, antara keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah dan kinerja keuangan daerah seharusnya saling berkesinambungan. Semakin baik capaian kinerja keuangan pemerintah daerah tentu seharusnya berdampak positif bagi keberhasilan program pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya harapan masyarakat yang menginginkan jika pemerintah daerah terutama sudah memperoleh opini WTP maka sudah seharusnya tidak ada penyimpangan dana atau korupsi pada pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah tersebut. Dengan pengelolaan keuangan negara yang benar, masyarakat berharap program-program pembangunan berjalan sesuai tujuan sehingga target pembangunan bisa tercapai dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun terkait hal tersebut, sampai saat ini opini WTP sepertinya masih tidak berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan semakin banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, apakah hal tersebut juga diikuti oleh peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini yang masih menjadi persoalan penting yang harus dipikirkan dan dijawab.

1.2. Perumusan Masalah

Didukung dengan adanya Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, penulis tertarik melakukan penelitian tentang hubungan antara opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPD terhadap Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014?
2. Apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan tipe pemerintahan?
3. Apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan pembagian wilayah pulau?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menemukan bukti secara empiris apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014.

2. Menemukan bukti secara empiris apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan tipe pemerintahan.
3. Menemukan bukti secara empiris apakah terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan pembagian wilayah pulau.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi banyak pihak diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris dan sebagai bahan pertimbangan baik bagi pihak eksekutif maupun legislatif dalam upaya perbaikan kinerja keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gambaran hubungan kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTHESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja menurut Bastian (2006) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Dengan kata lain kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu organisasi baik publik maupun non publik. Pengukuran kinerja sangatlah diperlukan guna mengetahui

sejauh mana suatu organisasi menjalankan fungsinya ataupun untuk mengetahui bagaimana sebuah program/pelayanan dijalankan (Indrarti, 2011).

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja keuangan di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011).

Halim (2001) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Halim, 2001).

Menurut Mardiasmo (2009) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

Pengukuran kinerja keuangan sangat perlu dilakukan karena dari hasil penilaian akan dapat diketahui apakah potensi atau sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah telah dikelola dengan baik dan benar serta digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Untuk menjamin agar laporan kinerja pemerintah tersebut memiliki kredibilitas, transparan dan akuntabel yang tinggi, khususnya oleh pihak di luar pemerintahan selaku pelaksana sektor publik, maka perlu dilakukan audit sebagai proses penilaian yang sistematis dan obyektif (Ar Rozy dan Wijayanti, 2014). Audit sektor publik akan lebih memperhatikan audit kinerja terutama keuangan, yakni apakah penggunaan sumber daya dalam program kerja pemerintah telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan telah mencapai hasil yang efektif.

2.1.2. Opini Audit BPK atas LKPD

Aspek dari pemerintahan daerah yang memiliki peranan penting adalah pengelolaan keuangan daerah. Hal inilah mengapa diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah. Perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah dan anggaran daerah antara lain (Azhar, 2010) :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah pada khususnya;
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Lainnya;
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar;
5. Kejelasan aturan tentang pengeluaran operasional lain-lain yang tidak jelas akuntabilitas;
6. Prinsip anggaran dan kejelasan larangan pengaturan alokasi anggaran diluar yang ditetapkan dalam strategi dan prioritas APBD.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Sadjiarto, 2000). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan sebagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan sumber daya daerah berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan capaian kinerja keuangan Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. Masing-masing laporan keuangan kabupaten/kota menyampaikan kondisi keuangan kabupaten/kota yang dilaporkan pada tahun pelaporan. Kabupaten/kota memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan sumber daya keuangan atau APBD dan penggunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri yang akan berbeda dengan kabupaten/kota lain, walaupun format laporan keuangan adalah sama atau standar sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan daerah. (Prasetyaningsih, 2014)

Pada pemerintah daerah, kinerja keuangan diukur melalui beberapa alat ukur kinerja keuangan. Salah satunya yang paling umum adalah audit atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit atas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pada saat itu.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil akhir dari pemeriksaan keuangan adalah opini; pemeriksaan kinerja

adalah kesimpulan dan rekomendasi; sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan.

Pada pemeriksaan keuangan, BPK tidak hanya memberikan opini namun juga menilai tingkat efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada LHP BPK dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perjalanan dinas fiktif;
2. Belanja atau pengadaan fiktif lainnya;
3. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
4. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
5. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
6. Pemahalan harga (mark up);
7. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
8. Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
9. Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
10. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
11. Belanja tidak sesuai ketentuan atau lebih ketentuan; dan
12. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan (Mangkunegara, 2014).

Menurut Rai (2008) dalam Akbar dan Djazuli (2015), ada tiga jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 yang terdiri dari audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

“Audit atas laporan keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”

“Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN (2007) disebutkan:

“Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

“Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja,

pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa”.

Hasil audit keuangan adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. WDP diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan sehingga auditor memberikan opini WDP adalah adanya penyimpangan prinsip yang material dan pembatasan lingkup pemeriksaan yang berdampak material. TMP diberikan oleh auditor apabila terdapat penyimpangan prinsip akuntansi (salah saji), baik secara individual maupun agregat, yang sangat material. Sedangkan opini TW diberikan apabila terdapat pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai. Selain itu dalam kondisi ekstrim, meskipun bukti pemeriksaan terkait setiap ketidakpastian telah cukup memadai, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan. (SPKN, 2007)

Hasil akhir dari pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dan kesimpulan atas keekonomian, efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi (Akbar dan Djazuli, 2015).

2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai di setiap Negara”. Warga negara yang belum terpenuhi atas hak dan kebutuhan dasarnya secara layak maka negara belum mampu memberikan pelayanan sosial dengan baik. Sebagai akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam terminologi akademik merujuk pada kesejahteraan sosial yang mana telah mengalami pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial pada hakekatnya menunjuk kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan

materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (*order*) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi. Midgley (2005) dalam Susetiwawan (2009) mengkonseptualisasikan dalam tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni pertama sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Kesejahteraan yang paling mendasar sejatinya meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia. Dari berbagai literatur disebutkan, salah satunya menurut Nasikun (1993) dalam Prasetyo (2015) menyebutkan konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator antara lain: (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*Identity*). Keempat indikator tersebut adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi guna memperoleh apa yang disebut kesejahteraan.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989) dalam Bungkaes dkk. (2013), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989) dalam Bungkaes dkk. (2013), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (status sosial).

Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera (Sasana, 2013).

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Pada awal tahun 1990-an Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

HDI menjadi indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2003).

Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/ daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Adapun komponen pengukur IPM berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik terdiri dari (BPS, 2015):

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

c. Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan didasarkan pada 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{keehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

2.1.4. Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan) antara prinsipal (pemberi kerja) dengan agen (penerima perintah) (Gudono, 2014). Prinsip *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) (Prasetyaningsih, 2014). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal yang mana hal

ini menunjukkan ada situasi ketimpangan informasi (*information asymmetry*) serta kepentingan agen dan principal berbeda maka akan terjadi *principal-agent problem*. Adanya *principal-agent problem* tersebut akan membuat agen melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal (Gudono, 2014).

Dipandang dari sudut pandang teori keagenan, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan wewenang pengelolaan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain) (Prasetyaningsih, 2014).

Semenjak diberlakukan sistem otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik. Sedangkan legislatif yang merupakan perwakilan masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim dan Abdullah, 2006).

Eksekutif yang bertindak sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal dalam teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan dengan masyarakat (Nurdin, 2014). Asimetri informasi ini dapat mengakibatkan konflik antara kedua pihak (*agency problem*). Menurut Colombatto (2001) dalam Halim dan Abdullah (2006), adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi.

Masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mengharapkan pemerintah bisa mengakomodasi keinginan masyarakat agar memberikan pelayanan publik serta bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Adanya asimetri informasi oleh kedua belah pihak, penyalahgunaan informasi oleh pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) dalam Nurdin (2014) hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adversse selection* yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

Sesuai TAP MPR Nomor: XV/MPR/1998 Pasal 1 dikatakan bahwa “penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan dengan daerah” (Jurdi, 2014). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya semaksimal mungkin. Penggunaan sumber daya dalam bentuk APBN/APBD tetap membutuhkan pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang yaitu masyarakat.

Pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang diperoleh masyarakat sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif harus mengawasi dan memantau apakah APBN/APBD yang ada telah dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat percaya adalah dengan memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik.

Agency problem yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat bisa diminimalisir dengan pencapaian kinerja yang baik oleh pemerintah. Masyarakat sebagai prinsipal dapat melihat dan mengukur bagaimana hasil kinerja pemerintah daerah. Pemerintah harus dapat mengelola dan mengukur kinerjanya dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang benar dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat (Akbar dan Pilcher, 2012 dalam Nurdin, 2014).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan. Pengukuran kinerja pemerintah menjadi hal yang cukup penting mengingat pemerintah merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya demi mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah, masyarakat hanya melihat dari opini audit yang diperoleh pemerintah daerah namun masyarakat masih kurang melihat pada indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah lainnya.

Asmoko (2014) meneliti hubungan antara perolehan opini hasil audit laporan keuangan pemerintah pusat di kementerian negara/lembaga (LKKL) dengan hasil evaluasi LAKIP K/L. Meskipun hasil opini audit BPK atas LKKL selama tahun 2009 sampai dengan 2013 memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik, begitu juga dengan hasil evaluasi LAKIP K/L selama tahun 2011 sampai 2013 namun hasil korelasi keduanya tidak signifikan. Hasil tersebut membuktikan belum terdapat hubungan antara opini audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang tidak signifikan.

Nurdin (2014) membuktikan secara empiris pengaruh tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan BPK RI terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Nurdin menggunakan skor evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai proksi dari keberhasilan

kinerja pemerintah daerah. Sampel yang digunakan sebanyak 265 entitas berdasarkan *stratified random sampling* dari total 438 kabupaten/kota di Indonesia, analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif. Tingkat belanja daerah dan temuan audit BPK justru tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penelitian Prasetyaningsih (2014) melihat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekayaan daerah atau total aset digunakan sebagai proksi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi belanja daerah dan temuan audit BPK menjadi variabel independen dan IPM sebagai proksi dari kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan terdiri dari 489 kabupaten/kota di Indonesia dengan regresi linear berganda sebagai alat analisis yang digunakan. Hasil analisis membuktikan kekayaan daerah (total aset) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan temuan audit BPK berpengaruh negatif sedangkan belanja daerah justru tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mangkunegara (2015) juga membuktikan secara empiris melalui penelitiannya yang melihat pengaruh karakteristik keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai variabel independen digunakan total aset, belanja modal, dan hasil pemeriksaan BPK sedangkan untuk variabel dependen digunakan IPM. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel

dan menggunakan sampel sebanyak 34 entitas yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kota dan 25 Pemerintah Kabupaten dengan periode pengambilan data dari tahun 2011-2013. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja modal) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.

Akbar dan Djazuli (2015) mencoba menggambarkan hubungan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat pada kabupaten Badung, Tabanan dan kota Denpasar tahun 2013. Akbar dan Djazuli mencoba menggambarkan perbandingan antara pencapaian ekonomi dan kesejahteraan atau pemerataan ekonomi menggunakan metode teknik komparasi dan *scatter plot* serta untuk membandingkan scoring yang didapat dari *scatter plot* dengan opini laporan keuangan pada Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar. Hasil kajian membuktikan bahwa secara empiris untuk data Bali tahun 2013 belum terlihat hubungan yang kuat antara audit keuangan dengan indikator kesejahteraan ekonomi. Secara umum hasil penelitian menunjukkan belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat.

Banyak penelitian yang mencoba melihat hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dilihat melalui opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat melalui nilai IPM yang dikeluarkan oleh BPS. Opini BPK menjadi salah satu indikator akuntabilitas atas kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan IPM menjadi indikator

pencapaian tujuan pembangunan. Dari hasil penelitian yang beragam sampai saat ini masih banyak dipertanyakan apakah keberhasilan pada pengelolaan keuangan tersebut turut dibarengi dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara kinerja keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Asmoko (2014)	- Variabel yang diteliti: opini audit BPK, hasil evaluasi LAKIP K/L	Analisis deskriptif dan analisis korelasi	- Hasil opini audit BPK atas LKKL selama tahun 2009 sampai dengan 2013 memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik, begitu juga dengan hasil evaluasi LAKIP K/L selama tahun 2011 sampai 2013. - Belum terdapat hubungan antara opini audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang tidak signifikan
Nurdin (2014)	- Variabel bebas: tingkat kekayaan pemerintah daerah; tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat; belanja daerah; dan temuan audit BPK - Variabel terikat: Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Analisis regresi linier berganda	- Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif. - Tingkat belanja daerah dan temuan audit BPK justru tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Prasetyaningsih (2014)	- Variabel bebas: kekayaan pemerintah daerah; realisasi belanja daerah; dan temuan audit BPK - Variabel terikat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Analisis regresi linier berganda	- Kekayaan daerah (total aset) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan temuan audit BPK berpengaruh negatif. - Belanja daerah justru tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mangkunegara (2015)	- Variabel bebas: total aset; belanja modal; dan hasil pemeriksaan BPK - Variabel terikat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Analisis regresi data panel estimated generalized least Square (EGLS)/ ordinary least square (OLS)	- Total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja modal dan hasil pemeriksaan BPK berpengaruh negatif signifikan.
Akbar dan Djazuli (2015)	- Variabel yang diteliti: opini laporan keuangan; tingkat pertumbuhan ekonomi; LPE; rasio gini; tingkat kemiskinan; tingkat pengangguran; dan IPM	Metode komparasi dan <i>Scatter plot</i>	- Berdasarkan scatter plot yang dilakukan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mendapatkan score yang lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Bali. - Secara empiris dibuktikan bahwa untuk data Bali tahun 2013 belum terlihat hubungan yang kuat antara audit keuangan dengan indikator kesejahteraan ekonomi.

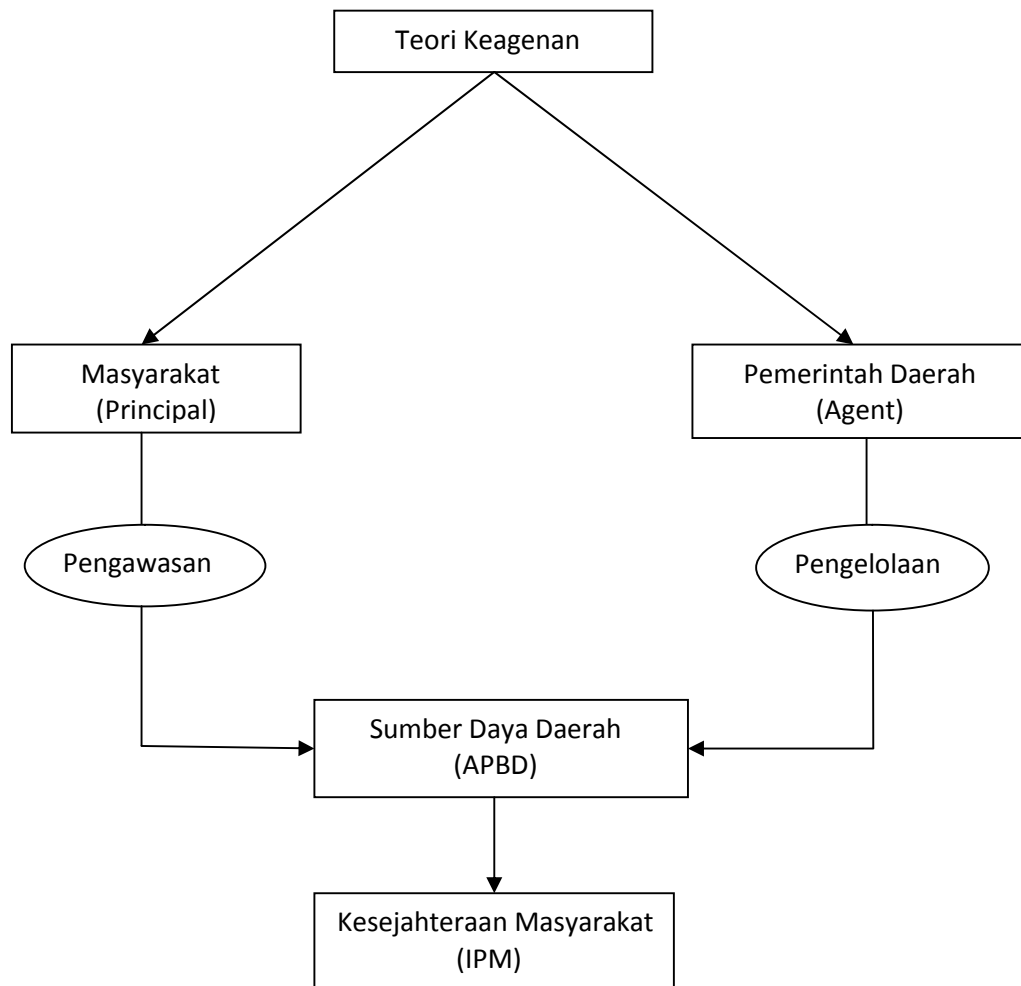
Sumber: berbagai penelitian

2.3. Rerangka Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah akan terlihat dari tercapainya kesejahteraan masyarakat. Prioritas dari setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan

sumber daya secara maksimal oleh pemerintah daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1. Rerangka Penelitian



Sumber: Nurdin (2014) dan Prasetyo (2015)

Penggunaan sumber daya berupa APBD membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi cerminan bahwa pemerintah telah menggunakan sumber daya sesuai dengan semestinya. Apabila kinerja keuangan daerah telah baik maka hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun

juga kinerja pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kinerja pemerintah secara kelembagaan akan saling terkait. Keberhasilan pada pengelolaan keuangan akan berdampak positif pada keberhasilan pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga sebaliknya tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah seharusnya turut didukung oleh kinerja keuangan yang baik.

Pada penelitian ini akan dilihat apakah terdapat hubungan antara hasil audit BPK atas LKPD untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan IPM. Pengelolaan keuangan yang baik sewajarnya akan diikuti dengan capaian kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dari hasil penelitian dapat diketahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian wewenang dari masyarakat kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya secara optimal dengan harapan pemerintah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kinerja keuangan yang baik melalui pengelolaan APBD yang akuntabel dan transparan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan.

Melalui hasil audit oleh BPK akan tercermin kinerja keuangan daerah berupa opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang bagus atau WTP mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel begitu juga sebaliknya. Keberhasilan pada kinerja keuangan seharusnya akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yaitu dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pada keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari perumusan masalah dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini diduga:

1. Terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014;
2. Terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan tipe pemerintahan;
3. Terdapat hubungan antara opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 berdasarkan pembagian wilayah pulau.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif merupakan sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Leksono, 2013). Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kondisi masyarakat setempat yaitu dengan menganalisis hubungan antara hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa hasil opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan manusia untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Seluruh data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi untuk mengetahui signifikansi adanya keterkaitan antara opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten kota di Indonesia tahun 2014.

3.2. Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (Martono, 2012).

3.2.1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2014. Data dan informasi opini hasil audit atas LKPD diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD untuk Kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diperoleh dari BPK RI. Data tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

3.2.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514 kabupaten/kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat

mewakili populasi (Martono, 2012). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *stratified random sampling* yaitu merupakan tehnik penentuan sampel dengan metode pengambilan sampel didasarkan pada kelas atau strata tertentu. Pada metode *stratified random sampling*, populasi dibagi dalam kelompok yang homogen terlebih dahulu atau dalam strata selanjutnya anggota sampel ditarik dari setiap strata. *Stritified* digunakan apabila populasi dari sifat yang ingin diteliti sangat mengelompok di satu tempat dan sporadis di tempat yang lain. Selain itu, *Stritified* digunakan jika estimasi yang cukup tepat diinginkan untuk bagian tertentu dari populasi. Dengan menggunakan metode *stratified random sampling*, subjek penelitian dipilih berdasarkan persamaan dalam strata atau kelas tertentu sesuai tujuan penelitian.

Dalam penelitian digunakan sebanyak 502 Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria memiliki data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian terdiri dari 405 kabupaten dan 97 kota dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya pengelompokan sampel dilakukan sesuai strata yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada tipe pemerintahan dan wilayah kepulauan. Pengelompokan sampel berdasarkan tipe pemerintahan dan wilayah kepulauan digunakan karena diasumsikan daerah dengan tipe pemerintahan dan wilayah kepulauan yang sama memiliki karakteristik dan kondisi demografi yang mirip.

Pada tipe pemerintahan, sampel dikelompokkan berdasarkan persamaan tipe pemerintahan daerah tingkat II yaitu kabupaten dan kota. Pada pengelompokan berdasarkan wilayah kepulauan, sampel dikelompokkan berdasarkan persamaan

wilayah kepulauan dari kabupaten/kota tersebut berada. Berdasarkan wilayah kepulauan, sampel dibagi menjadi lima kelompok wilayah berdasarkan lima pulau utama di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan NTB-NTT-Maluku-Papua.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam melihat hubungan antara hasil audit atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel untuk dianalisis antara lain: Opini hasil audit atas LKPD dari BPK RI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia yang didefinisikan sebagai berikut:

3.3.1. Opini audit BPK atas LKPD

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan

menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Penjelasan atas setiap jenis opini adalah sebagai berikut:

- 1). Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material.
- 2). Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3). Opini tidak wajar (*adversed opinion*), opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material.
- 4). Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*), pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan.

Selanjutnya untuk melakukan pengujian korelasi, variabel opini akan diurutkan menjadi variabel ordinal dengan memberi nilai 4 untuk perolehan opini WTP, nilai 3 untuk perolehan opini WDP, nilai 2 untuk opini Disclaimer dan nilai 1 untuk perolehan opini TMP.

3.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai

ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar tersebut yang mana memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Adapun dalam komponen pengukurannya IPM berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) terdiri dari:

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2. Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

3. Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao. Penghitungan paritas daya beli dilakukan didasarkan pada 96 komoditas kebutuhan pokok sehingga pada akhirnya diperoleh penghitungan akhir berupa pengeluaran per kapita.

Berdasarkan skala internasional capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat: kategori tinggi, menengah atas, menengah bawah, dan kategori rendah (Budiriyanto, 2011).

Tabel 3.1. Kriteria Capaian IPM

Tingkatan Status	Kriteria
kategori tinggi	(IPM>80)
kategori menengah atas	(66<IPM<80)
kategori menengah bawah	(50< IPM<66)
kategori rendah	(IPM<50),

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

3.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis hubungan antara opini hasil audit BPK atas LKPD dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia akan digunakan Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi. Analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi dilakukan menggunakan piranti SPSS 16.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang akan diuji. Statistik deskriptif dalam pada variabel penelitian memberikan gambaran dari populasi/sampel yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standard deviasi. Dari hasil analisis deskriptif dapat dilihat bagaimana kondisi dari sebaran data.

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil audit atas Laporan keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan (korelasi) linier antara dua variabel atau lebih (Mason dan Lind, 1999). Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Besarnya perubahan suatu variabel yang diikuti oleh perubahan variabel yang lain dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi (Suliyanto, 2011).

Analisis korelasi memiliki berbagai jenis yang penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data memiliki skala pengukuran interval atau rasio maka digunakan analisis korelasi *Product Moment* (*Pearson*), sedangkan jika data memiliki skala pengukuran ordinal maka digunakan Korelasi *Rank Spearman* atau Kendall Tau. Jika datanya berupa data kategorial maka dapat digunakan analisis *Chi Square* yang kemudian ditransformasikan ke koefisien kontigensi (Suliyanto, 2011).

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian, maka analisis korelasi yang akan digunakan merujuk pada penggunaan korelasi Rank Spearman.

Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan sekurang-kurangnya memiliki skala ordinal. Analisis korelasi Rank Spearman ini merupakan jenis analisis korelasi yang didasarkan pada rangking yang paling banyak digunakan.

Untuk menghitung koefisien korelasi Rank Spearman digunakan rumus sebagai berikut:

$$\rho_{xy} = 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2 - 1)}$$

Keterangan:

- ρ_{xy} = Koefisien korelasi rank spearman
- 6 = Konstanta
- d^2 = Kuadrat selisih antar rangking dua variabel
- N = Jumlah Pengamatan

Koefisien korelasi ρ_{xy} memiliki nilai yang berkisar antara -1 sampai dengan 1. Bila korelasi semakin mendekati angka satu berarti korelasi tersebut semakin kuat, tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0 berarti korelasi tersebut semakin lemah.

Tabel 3.2. Kriteria Koefisien Korelasi

Nilai Koefisien Korelasi	Kriteria
0,00 s.d. 0,29	Korelasi sangat lemah
0,30 s.d. 0,49	Korelasi lemah
0,50 s.d. 0,69	Korelasi cukup
0,70 s.d. 0,79	Korelasi kuat
0,80 s.d. 1,00	Korelasi sangat kuat

Sumber: Suliyanto, 2011

Kategori kekuatan korelasi hanya digunakan untuk memberikan kategori besarnya koefisien korelasi, sedangkan untuk menentukan signifikansi sebuah korelasi

tidak hanya bergantung pada besarnya koefisien korelasi tetapi juga tergantung pada ukuran sampel dan tingkat toleransi yang digunakan.

Hasil analisis dari tabel korelasi yang dihasilkan akan memperlihatkan nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel yang diamati dengan arah positif atau negatif. Selanjutnya untuk menguji koefisien korelasi tersebut secara statistik apakah signifikan atau tidak dapat dilihat pada nilai signifikansi yang secara otomatis muncul pada hasil analisis tabel korelasi. Atau dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi dengan nilai tabel untuk memperoleh kesimpulan apakah terdapat korelasi yang signifikan atau tidak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti secara empiris apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat melalui opini hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan kesejahteraan masyarakat direpresentasikan dari nilai IPM yang diperoleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan uji korelasi, pengujian dilakukan dengan sampel sebanyak 502 kabupaten/kota di Indonesia untuk opini BPK serta IPM yang diperoleh pemerintah daerah tahun 2014.

Pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini memberikan hasil yang cukup beragam. Penemuan dari hasil penelitian tentang keterkaitan antara opini BPK atas LKPD dengan IPM memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun kedua jenis ukuran kinerja pemerintah tersebut dihasilkan dari proses yang berbeda dan dilakukan oleh pihak yang berbeda semestinya diantara keduanya memperoleh hasil yang sejalan.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain:

- 1) Hasil uji korelasi pada opini BPK dengan IPM untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 menunjukkan adanya hubungan searah antara opini BPK dengan IPM meskipun hubungannya cukup lemah.
- 2) Hasil uji korelasi antara opini BPK dengan IPM pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dengan membedakan berdasarkan tipe pemerintahan yaitu kabupaten dan kota menunjukkan hasil yang berbeda. Pada tipe pemerintahan kabupaten menunjukkan terdapat hubungan searah antara opini BPK dengan IPM meskipun hubungannya lemah sekali sedangkan untuk tipe pemerintahan kota sebaliknya atau tidak terdapat hubungan.
- 3) Hasil uji korelasi antara opini BPK dengan IPM untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dengan mengelompokkan berdasarkan pembagian wilayah pulau menunjukkan hasil yang beragam. Pada wilayah Sumatera dan NTT-NTB-Papua-Maluku hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan searah antara opini BPK dan IPM dengan hubungan yang masih termasuk kategori lemah. Sedangkan antara opini BPK dengan IPM pada wilayah Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi justru terbukti tidak berkorelasi atau tidak berhubungan.
- 4) Berdasarkan dari serangkaian hasil pengujian korelasi secara empiris dapat dibuktikan bahwa hubungan antara opini hasil audit BPK LKPD dengan kesejahteraan masyarakat masih lemah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik tidak serta merta diikuti dengan keberhasilan kinerja pemerintah daerah begitu pun sebaliknya.

5.2 Saran

- 1) Bagi BPK RI disarankan agar pelaksanaan audit keuangan oleh BPK untuk kedepannya diharapkan dilaksanakan secara komprehensif. Pengukuran kinerja pemerintah tidak hanya pada sisi keuangan tetapi juga mengukur kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan seperti pada capaian *outcome* atas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan audit kinerja dengan mengukur dan menguji efektivitas output dan *outcome* yang disinyalir mempunyai hubungan yang lebih erat dengan pengelolaan keuangan.
- 2) Bagi pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian output tetapi juga harus berusaha pada pengoptimalan pencapaian *outcome* melalui kegiatan dan program yang dilaksanakan. Pengelolaan sumber daya secara optimal oleh pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya diukur melalui indikator output tetapi juga pada dampak dari output itu sendiri. Indikator-indikator kesejahteraan ekonomi pada dasarnya merupakan *outcome* yang dihasilkan atas digunakannya sumber daya ekonomi pemerintah daerah terutama sumber daya keuangan untuk program-program yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya perlu memperhatikan keterbatasan penelitian seperti penggunaan pengukuran variabel yang lebih variatif, pengujian hubungan yang lebih tinggi dan melihat faktor-faktor lain yang berpengaruh sehingga penelitian berikutnya dapat lebih dikembangkan dan memberikan gambaran yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, Akhmad Hafidzan dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*, Nusa Tenggara Barat, 24 – 27 September 2014. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2016/05/BF-B2c2-13-Pengaruh-Kesejahteraan-Masyarakat...-Dwi-Martani.pdf> diakses pada 14 April 2016.
- Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad. 2015. Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015: 1–19.
- Akib, Mulyati. 2014. *Implementasi Good Governance untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Se Sulawesi Selatan-Tenggara*. Disertasi S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/158/--mulyatiaki-7883-1-14-mulya-b.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2016.
- Asmoko, Hindri. 2014. Korelasi Opini Audit Bpk Atas LKKL dengan Hasil Evaluasi Lakip K/L. Artikel Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20424-korelasi-opini-audit-bpk-atas-lkkl-dengan-hasil-evaluasi-lakip-k-l>. Diakses pada 8 April 2016.
- Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Prestasi*, Vol 9 no. 1 (2012). <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/issue/view/3> diakses pada 21 April 2016.
- Ar Rozy, Muhammad dan Provita Wijayanti. 2014. The Influence of The Audit Opinion, The Original Area of Revenue (PAD) and The Equalization Fund (DP) to Regional Financial Performance (Empirical Studies on Local Governments that Exist in Central Java). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juli 2014, Hal. 81 – 100. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vbnY3qfRAhVFr48KHTZcCJkQFghnMAk&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unissula.ac.id> diakses pada 20 September 2016.

- Azis, Harry Azhar. 2016. Perolehan WTP Belum Disertai Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Pidato Ketua BPK yang berjudul "Fungsi BPK Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. <http://ugm.ac.id/id/berita/11275-perolehan.wtp.belum.disertai.peningkatan.kesejahteraan.rakyat>. Diakses pada 30 Mei 2016.
- Azis, Harry Azhar. 2016. BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat. Makalah Ketua BPK RI di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. <http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/11/Makalah-Ketua-BPK-UNUSA-30-Oktober-2015.pdf>. diakses pada 19 Mei 2016.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, Volume 2 No. 1, Maret 2010.
- Azwar dan Subekan, Achmat. 2014. Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Kota Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi*. Vol. 1 Tahun XII/2014: hal. 97-101.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *IHPS II Tahun 2015*. Jakarta: www.bpk.go.id/IHPS
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: www.bpk.go.id/SPKN
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 BPS*. www.bps.go.id. Diakses pada 19 Desember 2015.
- Badara, Saidu Mu'azu dan Siti Zabedah Saidin. 2014. *Empirical Evidence of the Moderating Effect of Effective Audit Committee on Audit Experience in the Public Sector: Perception of Internal Auditors*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol 5 No 10 Juni 2014. <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/2880/2842> diakses pada 9 November 2016.
- Badara, Saidu Mu'azu dan Siti Zabedah Saidin. 2012. *The Status of Internal Audit at Local Government Level in Nigeria*. *Journal of Business and Management*, Vol. 5 (5): 37-41. www.iosrjournal.org diakses pada 9 November 2016.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bartoszewicz, Anna. 2015. *Performance Audit As A Tool Oriented at The Accountability of Public Finance Spending in Poland Against The*

Background of UK Practices. Theoretical Journal of Accounting.
<http://7292.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1173804>
diakses pada 9 November 2016.

Budiriyanto, Eko. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Formulasi DAU*. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
<http://docplayer.info/395346-Indeks-pembangunan-manusia-ipm-dalam-formulasi-dau.html> diakses pada 7 Maret 2016.

Bungkaes, H. Risal, , J. H. Posumah dan Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal "ACTA DIURNA"* Edisi April 2013.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/download/1380/1091+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada 24 Februari 2016.

Ebimobowei, Appah dan Bariweni Binaebi. 2013. *An Examination of the Effectiveness of Auditing of Local Government Financial Reports in Bayelsa State, Nigeria. Journal of Social Sciences* Vol. 5(2): 45-53.
<http://maxwellsci.com/print/crjss/v5-45-53.pdf> diakses pada 14 November 2016.

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.

Gudono. 2014. *Teori Organisasi Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.

Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Artikel Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*.
<https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah>. diakses pada 21 April 2016.

Heriningsih, Suchyo dan Marita. Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, April 2013 hal 1-86.
<http://repository.upnyk.ac.id83141suchyo.pdf> diakses pada 21 April 2016.

Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Riau*.
<https://www.scribd.com/doc/168296654/HUBUNGAN-ANTARA-OPINI->

[AUDIT-PADA-LAPORAN-KEUANGAN-PAD-DAN-DAU-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-DAERAH](#) diakses pada 12 April 2016.

- Jensen M. C.; dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*. 11(4): 5-50.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mangkunegara, Irfan. 2015. Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Hasil Pemeriksaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015: 141 – 155.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ng'eni, Flavianus Benecdito. 2016. *Theoretical Aspect Underpinning Public Sector Audit and Financial Accountability in Tanzanian Local Government Authorities (LGAs)*. *International Journal of Finance and Accounting*, Vol 5(1); 46-53. <http://article.sapub.org/10.5923.j.ijfa.20160501.06.html> diakses pada 15 November 2016.
- Nurdin, Fandy. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285284&val=6467&title>. Diakses pada 21 April 2016.
- Nyman, Caroline dkk. 2005. *Accountability in local Government: A Principal-Agent Perspective*. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, Vol. 9 Iss 2 pp. 123 – 137. <http://emeraldinsight.com> diakses pada 9 November 2016.
- Prasetyaningsih, Erny. 2014. *Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia*. Thesis S2 Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Prasetyo, Wahyudi Eko. 2015. *Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi*. Thesis S2 Program Pasca Sarjana Magister Ilmu ekonomi Universitas Jember.

- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138–150.
- Said, M. Mas'ud, 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suryaningsih, Ni Made dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.2. Mei (2016): 1453-1481 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/16417/13847> diakses pada 09 Maret 2016.
- Susetiawan. 2009. *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*. Working Paper Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. <http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/61> diakses pada 30 Desember 2016.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- Usman, Husaini dan Purnomo, R. 2006. *Pengantar Statistika Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonosia.